



JKB

Jurnal Kewirausahaan & Bisnis
Volume 5 Issue 2, 2023 (75-78)

ISSN (online) : 3026-0167

Homepage : <https://jurnalunived.com/index.php/JKB>

Literasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Bengkulu Tengah

Anwar Hamid¹, Cici Anggraini², Belsa Eksan Tomi³, Haji Marsindo⁴, Vego Asisko⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial/Jurusan Administrasi Publik, Universitas Dehasen Bengkulu, Indonesia

¹ e-mail: anwarhamid2020@yahoo.com

Abstract. This activity aims to describe regional expansion policies, factors that support the implementation of regional expansion policies, analyze the form of policy implementation in the political, economic and socio-cultural fields, and analyze the implementation of regional expansion policies in supporting national integration in Bengkulu City. Factors that support the implementation of regional expansion policies are the existence of potential natural resources, investment, transportation and communication infrastructure, openness to outsiders and public support (community). The form of policy implementation in the political field includes the development of various political structures and infrastructure, transparency and accountability of government, increasing the role and active participation of the community in the decision-making process, freedom of politics and organization, upholding the rule of law and human rights, and realizing political stability. The economic sector includes accelerating the development of economic structures and infrastructure, managing the potential of natural resources and increasing employment, per capita income, Gross Regional Domestic Product and Regional Original Income. In the socio-cultural field, this includes fostering harmony among citizens, reducing socio-cultural gaps, improving the quality of education, regional structuring capabilities and empowering community groups, developing local cultural values and utilizing local wisdom in solving various problems. The implementation of regional expansion policies supports national integration in the city of Bengkulu, because; the realization of the stability of community life, the ease of obtaining public services, the increasing quality of public services, and the realization of integration in community life.

Keywords: *Policy Literacy, Expansion, Region*

Abstrak. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pemekaran daerah, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pemekaran daerah, menganalisis wujud implementasi kebijakan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya, serta menganalisis implementasi kebijakan pemekaran daerah dalam mendukung integrasi nasional di Kota Bengkulu. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pemekaran daerah adalah adanya sumber daya alam yang potensial, penanaman modal (investasi), infrastruktur transportasi dan komunikasi, keterbukaan terhadap pihak luar dan dukungan publik (masyarakat). Wujud implementasi kebijakan di bidang politik meliputi pembangunan berbagai struktur dan infrastruktur politik, adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, peningkatan peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kebebasan berpolitik dan berorganisasi, penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta terwujudnya stabilitas politik. Di bidang ekonomi meliputi percepatan pembangunan struktur dan infrastruktur ekonomi, pengelolaan potensi sumber daya alam dan peningkatan lapangan kerja, pendapatan perkapita, Produk Domestik Regional Bruto serta Pendapatan Asli Daerah. Di bidang sosial budaya meliputi pembinaan kerukunan hidup antar warga masyarakat, berkurangnya kesenjangan sosial

budaya, peningkatan kualitas pendidikan, kemampuan penataan wilayah dan pemberdayaan kelompok masyarakat ter.pencil, pengembangan nilai-nilai budaya lokal dan pemanfaatan kearifan lokal dalam menyelesaikan berbagai masalah. Implementasi kebijakan pemekaran daerah mendukung integrasi nasional di Kota Bengkulu, karena; terwujudnya stabilitas kehidupan bermasyarakat, adanya kemudahan memperoleh pelayanan publik, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan terwujudnya integrasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: *Literasi Kebijakan, Pemekaran, Wilayah*

PENDAHULUAN

Berbagai kondisi ketidakstabilan (instabilitas) politik yang dapat mengancam integrasi nasional karena adanya fenomena dan praktik pemekaran provinsi, kabupaten dan kota yang diwarnai oleh: reaksi pro dan kontra dikalangan masyarakat serta konflik struktural dan horizontal pasca pemekaran daerah. Secara teoritis, tuntutan pemekaran daerah propinsi, kabupaten, dan kota sangat dirasakan banyak manfaat positifnya jika dilihat dari perspektif (sudut pandang) kepentingan daerah, elit-elit politik lokal dan masyarakat lokal, seperti: rentang kendali pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, keamanan) menjadi lebih dekat, cepat dan murah (Agustono, 2005); semakin kuatnya posisi dan peran masyarakat sipil, terbukanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, adanya penegakkan hukum tanpa pandang bulu, perhatian terhadap wilayah dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan, dan pemanfaatan kearifan lokal di dalam menyelesaikan masalah (Argama, 2005); dan meningkatkan partisipasi dan pelayanan kelompok masyarakat yang terpinggirkan (Suwondo, 2008). Fenomena pemekaran propinsi, kabupaten dan kota yang hanya didasarkan pada kepentingan elit-elit politik tidak sejalan dengan jiwa atau semangat pemberian otonomi kepada daerah. Akibatnya pemekaran daerah banyak menimbulkan kompleksitas permasalahan bahkan menimbulkan dampak negatif di tingkat daerah, seperti: menguatnya etnosentrisme yang memungkinkan munculnya konflik antar etnis dan agama (sentimen suku, agama, ras dan antar golongan); menguatnya feodalisme lokal; meningkatnya korupsi di tingkat lokal; konflik antar elit atau antar penduduk dari etnis yang sama akibat adanya perbedaan kepentingan; serta tidak ada perubahan perhatian dan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat terpencil (Argama, 2005), lebih banyak bernuansa etnisitas, politis (elitis) dan perasaan dianaktirikan (stepchild) (Dwiyanto dkk., 2004), syarat dengan berbagai nuansa economic interest dan etnosentrisme interest (Alamsyah, 2008), bersifat etnisitas (kesukubangsaan) dibandingkan dengan pertimbangan rasional seperti tuntutan perbaikan pelayanan administrasi pemerintahan (Quinn, 2003), dan menuju homogenisasi suku atau agama (Ratnawati, 2006). Pada sisi lain, banyak daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran di Indonesia mengalami kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Pada umumnya daerah otonom baru gagal dalam: membangun struktur dan infrastruktur politik, memberantas korupsi, kolusi, nepotisme/KKN dan menjalankan pemerintahan demokratis, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah/ PAD dan Produk Domestik Regional Bruto/PDRB, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial budaya, dan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat lokal. Kondisi ini menyebabkan terjadinya berbagai konflik horizontal yang tidak hanya mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat, tetapi juga mengancam integrasi nasional (Bappenas, 2007). Sementara itu, fenomena pemekaran Kabupaten Luwu Timur tidak terlepas dari reaksi pro-kontra serta adanya berbagai konflik vertikal dan horizontal yang terjadi sejak tahun 1970-an sampai tahun 2000-an yang bersumber pada masalah-masalah: politik yaitu kebijakan politik dan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara, kepentingan elit-elit politik

lokal, konflik kepentingan antara elit pusat dan lokal, akses elit-elit politik lokal mengalami kemandekan, serta penegakan hukum yang tidak tegas terutama dalam menyelesaikan berbagai konflik pertahanan, ekonomi: penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak adil, adanya kesenjangan

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dilakukan dengan:

1. Teknik observasi yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung obyek penelitian dengan cara mencatat segala gejala yang di temukan dilapangan untuk mempelajari data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan topik penelitian. sebelum turun kelapangan peneliti menyusun pedoman obsevasi.
2. Teknik wawancara, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dengan penelitian. Sebelum turun ke lapangan peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara.
3. Teknik dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumtasi-dokumentasi yang ada dilokasi penelitian atau sumber lain yang terkait dengan obyek penelitian.sebelum turun ke lapangan terlebih dahulu Menyusun pedoman dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara formal, usulan pemekaran daerah Kabupaten Bengkulu tengah dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam UndangUndang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor: 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, yaitu persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Sedangkan implementasi kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Bengkulu tengah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2003.

Dari segi persyaratan administratif, hasil penelitian menunjukkan bahwa; ada kesepakatan atau persetujuan DPRD, persetujuan DPRD dan Gubernur Sulawesi Selatan, Dari segi persyaratan teknis, Kabupaten Bengkulu tengah memenuhi berbagai faktor yang menjadi dasar pemekaran daerah baru, yaitu; kemampuan ekonomi daerah, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Sedangkan dari aspek fisik kewilayahan, Kabupaten Bengkulu tengah memenuhi syarat untuk dimekarkan. Namun demikian, dalam implementasi kebijakan pemekaran daerah, para pelaksana kebijakan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, terutama pada masa awal terbentuknya Kabupaten Bengkulu tengah Tantangan dan hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik, sehingga Kabupaten Bengkulu tengah dinilai sebagai salah satu daerah pemekaran baru di Indonesia yang berhasil merealisasikan cita-cita dan tujuan pemekaran daerah.

Proposisi ini didukung oleh bukti-bukti fisik maupun non fisik yang ditemukan di lokasi penelitian. Hasil observasi, wawancara dengan para informan, serta pengkajian berbagai dokumen yang terkait dengan implementasi pemekaran daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu:melaksanakan tahapantahapan implementasi kebijakan, mengelola dan memanfaatkan faktor-faktor pendukung implemetasi kebijakan, mewujudkan implementasi kebijakan dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya sesuai dengan cita-cita dan tujuan

pemekaran daerah, tuntutan dan harapan masyarakat, serta menciptakan persatuan, kesatuan, dan stabilitas kehidupan bermasyarakat yang mendukung integrasi nasional. Sebagai suatu proses institusionalisasi politik, tahapan implementasi kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Bengkulu tengah berawal dari adanya tuntutan dan dukungan masyarakat, mahasiswa, dan tokoh masyarakat untuk membentuk kabupaten sendiri. Namun demikian proses perjuangan masyarakat untuk membentuk kabupaten sendiri mengalami hambatan akibat adanya konflik vertikal dan horizontal.

SIMPULAN

Tahapan implementasi kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Bengkulu Tengah telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 129 Tahun 2000 dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, serta fisik kewilayahan yang implementasinya meliputi; pembentukan perangkat pemerintahan daerah, penyusunan visi dan misi, penyusunan strategi pembangunan daerah, dan penyusunan program-program pembangunan daerah. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah; sumber daya alam, penanaman modal (investasi), infrastruktur transportasi dan komunikasi, keterbukaan terhadap pihak luar, dan dukungan publik (masyarakat). Wujud implementasi kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dibidang politik meliputi; (a) pembangunan berbagai struktur dan infrastruktur politik, (b) adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, (c) peningkatan peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, (d) kebebasan berpolitik dan berorganisasi, (e) penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM)

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. 2008. Semangat Menata Teritori: Semangat Menata Kekuasaan. Studi Tentang Pembentukan Luwu Raya: <http://www.rumahkiri.net>. down load tanggal 15 April 2008.
- Anggoro, Kusnanto. 2008. Mao Zedong: Desa mengepung Kota dan Kerusakan Sosial: <http://www.tempointeraktif.com/ang/min/01/48/kolom.htm>. down load tanggal 13 Mei 2008.
- Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*, Yogyakarta: IRE Press.
- Dye, Thomas R. 1982. *Understanding Public Policy*, Sevent edition. Englewood Cliffs, Prentice Hall, Inc.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*, Wasihington D.C: Congressional Quarterly Press
- Sabarno, Hari. 2007. *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Cet. Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sitepu, Anthonius P. 2008. *Konsep Integrasi Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*, <http://library.usu.ac.id/modules>, diakses 13 Mei 2008.
- Smith, B.C. 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*, London: George Allen & Unwin.